

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak keempat se-dunia. Hal itu dibuktikan melalui data BPS pada tahun 2024 mengenai jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 281.603.800 jiwa (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>). Dengan banyaknya jumlah penduduk yang telah disebutkan, negara Indonesia menjadi negara dengan jumlah kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Total populasi penduduk Indonesia tahun 2023 menurut World Bank mencapai 281,190.07 (<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>). Angka tersebut mencerminkan kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia berpengaruh terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata.

Salah satu permasalahan yang masih timbul hingga saat ini ialah tingkat pengangguran masyarakat Indonesia yang diakibatkan oleh populasi penduduk usia kerja yang terus bertambah tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia masih cukup sedikit. Ketidakseimbangan distribusi penduduk antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang memerlukan kebijakan tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan pengangguran menjadi masalah besar yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah pada suatu negara. Secara umum, pengangguran dapat diartikan dimana kondisi dari setiap individu yang tidak memiliki pekerjaan. Menurut Prasaja dalam Rahman & Riani (2023) pengangguran di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup serius dan akan berdampak pada masalah sosial lainnya, salah satunya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan pendapat Rizal dan Mukaromahi dalam Rahman & Riani (2023) yang mengatakan bahwa pengangguran ialah permasalahan yang perlu ditangani secara sosial kolektif bagi mereka yang terlibat dan mencakup juga masalah pribadi yang bersifat psikologis.

Pengangguran bukan hanya tentang isu sosial, melainkan juga merupakan permasalahan yang ekonomi yang kompleks. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya menimbulkan dampak sosial, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kondisi ini menjadi masalah yang cukup sentral dalam perekonomian global yang memengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja 2013 mengenai perluasan kesempatan kerja yang menyebutkan bahwa perlu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Indonesia berdasarkan perjanjian kerja yang mencakup unsur perintah, pekerjaan, dan upah.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS, total penduduk usia kerja sebanyak 214,00 juta jiwa dengan 142,18 juta jiwa diantaranya telah bekerja. Sementara itu, BPS mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 4,82% (BPS, 2024) (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguranterbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>). Persentase tersebut dapat dikatakan masih tinggi, maka dari itu perlunya suatu tindakan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna mengurangi lagi presentase pengangguran di Indonesia. Menurut Buku Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 4 Tahun 2021, penduduk yang telah memasuki usia kerja berdasarkan ketentuan pemerintah Indonesia ialah individu yang berusia antara 15 hingga 65 tahun (<https://satudata.kemnaker.go.id/publikasi/55>).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan presentase dari jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Berdasarkan Booklet Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Februari 2024 angkatan kerja merujuk pada individu berusia 15 tahun ke atas yang tergolong aktif secara ekonomi termasuk penduduk yang sedang bekerja, sementara waktu tidak bekerja tetapi memiliki pekerjaan, dan yang tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran mencakup individu yang tidak sedang bekerja tetapi masih aktif mencari pekerjaan, tengah mempersiapkan usaha bagi yang ingin berwirausaha, atau telah memperoleh pekerjaan tetapi belum mulai menjalankan pekerjaan tersebut.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan presentase jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dibandingkan dengan total penduduk usia kerja, yaitu individu berusia 10 tahun ke atas. (BPS, 2024) (<https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0IzI=/tingkatpartisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html>). Pada Februari 2024 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 720,40 ribu orang dibandingkan Februari 2023, sehingga total angkatan kerja mencapai sebanyak 24,14 juta orang. Berdasarkan data dari berita resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang berjumlah sebesar 73,02%, menunjukkan peningkatan sebesar 1,52% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (BPS, 2024). (<https://bappeda.jatimprov.go.id/2024/05/15/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-jawa-timur-februari-2024-sebesar-374-persen-atau-turun-059-persen/>).

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

No.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)			
	38 Provinsi	2023	38 Provinsi	2024
1	Banten	7,52	Banten	7,02
2	Jawa Barat	7,44	Kep. Riau	6,94
3	Kep. Riau	6,80	Jawa Barat	6,91
4	Dki Jakarta	6,53	Dki Jakarta	6,03
5	Maluku	6,31	Papua Barat Daya	6,02
6	Sulawesi Utara	6,10	Sulawesi Utara	5,98
7	Aceh	6,03	Maluku	5,96
8	Sumatera Barat	5,94	Papua	5,81
9	Sumatera Utara	5,89	Sumatera Barat	5,79
10	Papua Barat	5,38	Kalimantan Timur	5,75
11	Kalimantan Timur	5,31	Aceh	5,56
12	Jawa Tengah	5,13	Sumatera Utara	5,10

No	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)			
	38 Provinsi	2023	38 Provinsi	2024
13	Kalimantan Barat	5,05	Sulawesi Selatan	4,90
14	Jawa Timur	4,88	Papua Selatan	4,75
15	Kep. Bangka Belitung	4,56	Jambi	4,45
16	Jambi	4,53	Jawa Tengah	4,39
17	Sulawesi Selatan	4,33	Papua Barat	4,31
18	Kalimantan Selatan	4,31	Kalimantan Barat	4,20
19	Maluku Utara	4,31	Maluku Utara	4,16
20	Riau	4,23	Lampung	4,12
21	Lampung	4,23	Kalimantan Utara	4,01
22	Sumatera Selatan	4,11	Sumatera Selatan	3,97
23	Kalimantan Tengah	4,10	Kalimantan Selatan	3,89
24	Kalimantan Utara	4,01	Riau	3,85
25	Di Yogyakarta	3,69	Kep. Bangka Belitung	3,85
26	Bengkulu	3,42	Jawa Timur	3,74
27	Sulawesi Tenggara	3,15	Kalimantan Tengah	3,67
28	Nusa Tenggara Timur	3,14	Nusa Tenggara Barat	3,30
29	Gorontalo	3,06	Di Yogyakarta	3,24
30	Sulawesi Tengah	2,95	Sulawesi Tenggara	3,22
31	Nusa Tenggara Barat	2,80	Bengkulu	3,17
32	Bali	2,69	Nusa Tenggara Timur	3,17
33	Papua	2,67	Sulawesi Tengah	3,15
34	Sulawesi Barat	2,27	Gorontalo	3,05
35	Papua Barat Daya	-	Sulawesi Barat	3,02
36	Papua Selatan	-	Papua Tengah	2,49
37	Papua Tengah	-	Bali	1,87
38	Papua Pegunungan	-	Papua Pegunungan	1,18

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah oleh penulis (2024)

(<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>, diakses pada 14 Februari 2025)

Berdasarkan tabel diatas, Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai provinsi dengan struktur ekonomi yang kuat, nyatanya masih terdapat angka pengangguran terbuka sebesar 3,74% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum

tentu menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai di semua sektor. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu berupaya dalam menekan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap kesesuaian antara *supply* dan *demand* kompetensi kerja yang diperlukan guna memenuhi tuntutan dan standar yang ditetapkan oleh Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).

Perlunya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia menjadi suatu kebutuhan strategis guna mempersiapkan individu dalam menghadapi dinamika dan persaingan di pasar kerja, melalui peningkatan kualitas serta penguatan kompetensi yang relevan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi melalui persiapan dan perencanaan aktivitas pelatihan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi agar mencapai tujuan dari pelatihan tersebut.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2023	2024
Kabupaten Pacitan	1,83	1,56
Kabupaten Ponorogo	4,66	4,19
Kabupaten Trenggalek	4,52	3,90
Kabupaten Tulungagung	5,65	4,12
Kabupaten Blitar	4,91	4,77
Kabupaten Kediri	5,79	5,10
Kabupaten Malang	5,70	5,13
Kabupaten Lumajang	3,67	3,28
Kabupaten Jember	4,01	3,23

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2023	2024
Kabupaten Banyuwangi	4,75	4,03
Kabupaten Bondowoso	4,15	3,63
Kabupaten Situbondo	3,27	3,15
Kabupaten Probolinggo	3,24	3,00
Kabupaten Pasuruan	5,48	5,02
Kabupaten Sidoarjo	8,05	6,49
Kabupaten Mojokerto	4,67	3,87
Kabupaten Jombang	4,66	3,75
Kabupaten Nganjuk	4,68	3,87
Kabupaten Madiun	5,14	4,34
Kabupaten Magetan	4,16	3,28
Kabupaten Ngawi	2,41	2,40
Kabupaten Bojonegoro	4,63	4,42
Kabupaten Tuban	4,40	4,28
Kabupaten Lamongan	5,46	4,34
Kabupaten Gresik	6,82	6,45
Kabupaten Bangkalan	6,18	5,35
Kabupaten Sampang	2,72	2,50
Kabupaten Pamekasan	1,74	1,64
Kabupaten Sumenep	1,71	1,69
Kota Kediri	4,06	3,91
Kota Blitar	5,24	5,11
Kota Malang	6,80	6,10
Kota Probolinggo	4,53	4,44
Kota Pasuruan	5,64	4,63
Kota Mojokerto	4,73	3,76
Kota Madiun	5,85	4,30
Kota Surabaya	6,76	4,91
Kota Batu	4,52	3,63

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024

(<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada 14 Februari 2025)

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur diatas, Kabupaten Gresik yang dikenal sebagai kota industri justru pada tahun 2024 menyatakan bahwa persentase pengangguran sebesar 6,45%. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik mencapai 50.368 orang. Angka tersebut terdiri dari 20.878 orang yang pernah bekerja kemudian menganggur dan sebanyak 29.490 orang yang memang belum pernah bekerja (GresikSatu, 2024) (<https://www.gresiksatu.com/jumlah-pengangguran-di-kabupaten-gresik-masih-tinggi-paling-banyak-lulusan-sma/>). Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak angkatan kerja yang belum terserap di berbagai sektor lapangan pekerjaan.

Tingginya angka pengangguran ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi para pencari kerja. Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan penambahan jumlah lowongan kerja yang tersedia, presentase dari jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan relatif kecil dari jumlah pelamar. Hal itu mengakibatkan jumlah pengangguran semakin bertambah karena banyak pencari kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

Tabel 1.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tabel Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2023

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tabel Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
I. Angkatan Kerja	444.871	452.943	276.001	286.070	720.872	739.013
1. Bekerja	417.143	423.861	247.228	264.784	664.371	688.645
2. Pengangguran Terbuka	27.728	29.082	28.773	21.286	56.501	50.368

II. Bukan Angkatan Kerja	73.727	74.839	260.807	240.042	334.534	314.881
1. Sekolah	33.811	38.750	43.900	45.981	77.711	84.731
2. Housekeeping	16.440	17.579	197.004	175.832	213.444	193.411
3. Lainnya	23.476	18.510	19.903	18.229	43.379	36.739
Jumlah	518.598	527.782	536.808	526.112	1.055.406	1.053.894

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, diolah oleh penulis (2024) (<https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/penduduk-berumur-15-tahun-keatas-menurut---table---jenis-kegiatan-selama-seminggu.html>, diakses pada 14 Februari 2025)

Dilihat dari tabel diatas dapat disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah total angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Gresik. Apabila angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik dilihat dari tahun 2022-2023 kategori jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1.354, sedangkan dari kategori jenis kelamin perempuan mengalami penurunan sebesar 7.447. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah pengangguran terbuka dari kategori jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Gresik.

Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2023

Tingkat Pendidikan Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1. Belum Tamat SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Tamat SD	-	59	28	1	15	12	1	74	40
3. Tamat SMP	2	118	43	7	30	16	9	148	59
4. Tamat SMA	292	1.886	1.233	144	322	354	436	2.208	1.587
a. Umum	74	662	405	44	143	180	118	805	585
b. Kejuruan	218	1.224	828	100	179	174	318	1.403	1.002

5. Diploma I II Akta I II	1	33	28	2	8	8	3	41	36
6. Diploma III Akta III Sarjana Muda	19	129	115	26	88	96	45	217	211
7. Sarjana	94	1.206	983	145	905	987	239	2.111	1.970
Jumlah	408	3.431	2.430	325	1.368	1.473	733	4.799	3.903

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik 2021-2023 (Gresik, 2024) (<https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUxIzI=/jumlah-pencari-kerja-menurut-tingkat-pendidikan.html>, diakses pada 14 Februari 2025)

Dari data tingkat pendidikan pencari kerja tahun 2023 di Kabupaten Gresik menunjukkan jumlah total 3.903. Berdasarkan pendidikannya, jumlah penduduk 15 tahun keatas yang paling banyak mencari pekerjaan ialah lulusan sarjana yaitu sebanyak 1.970 dan lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK) yaitu sebanyak 1.587 orang. Angka tersebut akan terus naik dikarenakan jumlah pertumbuhan penduduk di Gresik yang pastinya naik pula. Peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah berpotensi menyebabkan peningkatan angkatan kerja, yang sering kali tidak diimbangi oleh jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan demikian, diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menurunkan angka pengangguran secara efektif bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Pasal 8 ayat 1 tentang peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja melalui pelatihan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten ialah terjalannya kerjasama dalam mendukung perkembangan kompetensi para pemuda produktif di Gresik melalui pelatihan. Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Kamar Dagang dan

Industri (Kadin) mendirikan program Rumah Vokasi yang berperan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif di pasar kerja. Program Rumah Vokasi ini juga didukung oleh rekan-rekan strategisnya yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Gresik. Hal tersebut merupakan langkah progresif yang diadakan agar mendorong SDM di Gresik agar mampu meningkatkan daya saing yang tinggi di pasar kerja dan juga dapat mengatasi angka pengangguran yang terbilang masih cukup tinggi di Gresik. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bupati Gresik yaitu Bapak Fandi Akhmat Yani dalam berita online www.gresiksatu.com :

“Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa Rumah Vokasi Gresik merupakan upaya bersama-sama dari Pemerintah Kabupaten Gresik dengan semua rekan strategis yang ada yaitu Kadin, Apindo, dan Hipmi dengan tujuan untuk menghadapi tantangan industrialisasi kedepan, yang tujuan akhirnya adalah penurunan angka pengangguran di Kabupaten Gresik. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indar Parawansa bahwa Gresik merupakan salah ring satu untuk area industri. Oleh karenanya, penyiapan masyarakat Gresik untuk memiliki vokasi tertentu menjadi sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan industri yang ada di Gresik.”

(<https://www.gresiksatu.com/pertama-di-indonesia-gresik-miliki-rumah-vokasi-bupati-semoga-menurunkan-pengangguran/>, diakses pada 24 September 2024)

Rumah Vokasi ini menjadi salah satu program nawa karsa bupati sebagai perwujudan Gresik Pintar yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan yang berlandaskan pada akhlakul karimah sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 terkait fokus urusan wajib non pelayanan dasar (Perda, 2023). Visi dari Rumah Vokasi Gresik ialah “Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing”, sedangkan misi dari Rumah Vokasi Gresik yakni “Sebagai jembatan hubungan antara dunia pendidikan dengan

industri, sebagai tempat konsultasi dan konsolidasi antara industri dengan mitra sekolah/ perguruan tinggi, serta peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) pada pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri”. Gubernur Jawa Timur dalam berita kominfo.jatimprov.go.id berharap program ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri

“Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Rumah Vokasi ini akan memberikan dampak lebih signifikan bila mendapatkan dukungan dari banyak pihak.... Dengan Harapan, warga Gresik akan berperan signifikan khususnya bagi siswa SMK untuk mengisi area industri sehingga secara spesifik diarahkan agar sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan.”

(<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/resmikan-rumah-vokasi-gresik-gubernur-khofifah-optimistis-tingkatkan-ketrampilan-turunkan-pengangguran-terbuka-di-jatim>, diakses pada 24 September 2024)

Rumah Vokasi Gresik ini terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 108 Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Tujuan dari program Rumah Vokasi Gresik yaitu untuk mendorong terwujudnya *link and match* antara pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam mewujudkan SDM di Gresik yang unggul dan berdaya saing (Gresik, 2023). Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan industrialisasi kedepan sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan program ini ialah penurunan angka pengangguran di Kabupaten Gresik (Gresik, 2023) (<https://kadingresik.or.id/rumah-vokasi.php>).

Dalam melaksanakan ketentuan Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan, maka diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Gresik. Hal itu termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Di Daerah Pasal 23 terkait peningkatan

kompetensi dan keterampilan kerja untuk pencari kerja dan tenaga kerja lokal. Pencari kerja atau tenaga kerja yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja berhak mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi kompetensi tersebut diberikan kepada calon tenaga kerja yang memenuhi standar kualifikasi dan keterampilan yang telah ditetapkan.

Tentunya harapan dari pelaksanaan program ini ialah guna mempersiapkan generasi muda di Gresik agar siap menghadapi tantangan dunia kerja, memiliki kompetensi yang memadai, dan juga mengembangkan jiwa *entrepreneur* terutama di Kabupaten Gresik. Rumah vokasi mempunyai program kerja diantaranya yakni pendampingan (pengembangan program) SMK Unggul, fasilitasi kegiatan MGMP (kompetensi dan pemahaman guru kejuruan terhadap industri), fasilitasi PKL siswa SMK, dan koordinasi pelatihan dan atau sertifikasi BNSP. Salah satu programnya ialah koordinasi pelatihan berbasis kompetensi bersama pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif di pasar kerja.

Dalam pelaksanaan pelatihan itu, terdapat beberapa jenis pelatihan yang telah dilaksanakan ialah pelatihan *scaffolding*, tataboga, ahli K3 umum, gada pratama (satpam), *basic content creator*, barista, dan masih banyak lagi. Terdapat dua jenis pelatihan yaitu Ahli K3 Umum dan *bakery* yang sangat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, dimana lulusan dari pelatihan tersebut langsung mendapatkan kerja dan berwirausaha secara mandiri. Namun, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun

2023 yang menyebutkan bahwa presentase pencari kerja yang diberikan pelatihan sebesar 11,37%, sebanyak 252 orang sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 264 orang yang tercatat telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Tentunya hal itu masih dikatakan cukup sedikit dari jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan keterampilan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten.

Oleh karena itu, perlunya keefektifan dalam menjalankan suatu program agar menghasilkan output yang diinginkan oleh suatu organisasi atau lembaga. Evaluasi dalam efektivitas sangat penting juga dikarenakan organisasi atau lembaga perlu memberikan laporan akuntabilitas. Selaras dengan pendapat (Yulianti, 2020) yang menyebutkan bahwa efektivitas ialah sejauh mana program yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia karena pada dasarnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari proses pembangunan.

Seiring berjalannya program pelatihan yang termasuk salah satu program Rumah Vokasi mencerminkan wujud komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kadin Gresik. Dalam pelaksanaan program Rumah Vokasi di Kabupaten Gresik masih belum terlepas dari berbagai macam persoalan dalam menetapkan sasaran program pelatihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Choirul Rizal selaku Direktur Rumah Vokasi Gresik dalam berita kabarbaik.co.

“Program ini wajib didukung oleh semua perusahaan dengan catatan kompetensi masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama para stakeholder untuk bisa mewujudkannya”

(<https://kabarbaik.co/gelar-15-pelatihan-rumah-vokasi-gresik-bareng-ptfi-siapkan-pekerja-kompeten/>, diakses pada 18 Desember 2024)

Namun, kurangnya peningkatan kapasitas tenaga kerja berbasis pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri juga menjadi tantangan tersendiri. Industri di Kabupaten Gresik masih belum bisa mengidentifikasi bidang-bidang pelatihan yang relevan dengan kebutuhannya sehingga sedikit kesulitan dalam menentukan target programnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu konsultan Rumah Vokasi pada saat wawancara pendahuluan.

“Beberapa industri di Gresik masih belum mampu untuk memetakan bidang-bidang pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mereka butuh pelatihan K3 maka akan terus digiatkan pelatihan tersebut begitupun yang lainnya”. (Wawancara pendahuluan tanggal 20 Desember 2024)

Penyampaian informasi atau sosialisasi secara efektif kepada masyarakat Kabupaten Gresik sangat diperlukan agar mereka mengetahui terkait adanya program pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Sosialisasi program pelatihan ini hanya disampaikan secara *online* melalui akun *Instagram* Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan Rumah Vokasi Gresik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada saat wawancara pendahuluan.

“Ada, biasanya sosialisasi yang disampaikan atau di *sounding* melalui akun *instagram @disnakerkabgresik* sebelum pelatihan-pelatihan tersebut dibuka. Terkadang ada beberapa perwakilan dari desa-desa yang menyampaikan ke warganya tetapi ada juga yang tidak”. (Wawancara pendahuluan tanggal 12 Februari 2025)

Dalam praktik efektivitas seringkali dipengaruhi oleh aspek penentuan tujuan program yang menjadi salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan program. Namun, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian kurikulum dan sebagian besar jumlah angkatan kerja didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan perusahaan/industri mengalami kesulitan

mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Adik Dwi Putranto selaku Ketua Kadin Jatim pada saat peresmian Rumah Vokasi di Gresik dalam berita jawapos.com.

“Industri di Gresik cukup banyak, baik nasional maupun asing. Namun, saya lihat belum ada *link and match* dengan angkatan kerja lokal sehingga diisi banyak pekerja dari luar Gresik. Ke depan, saya titip Kadin Gresik harus membangun ini sehingga tidak ada masyarakat lokal yang menganggur. Jika tidak ada persiapan dalam hal kompetensi SDM yang mumpuni dan lapangan pekerjaan, akan tercipta kondisi ekstrem yaitu, meningkatnya angka pengangguran”

(<https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01393666/diresmikan-gubernur-hadir-rumah-vokasi-pertama-di-gresik>, diakses pada 20 November 2024)

Permasalahan tersebut sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Choirul Rizal melalui acara yang mengusung tema “Kolaborasi Menciptakan Sinergi Perubahan Menuju Peningkatan Keterampilan SDM Kota Gresik dan Siap Bersaing di Dunia Industri dan Kewirausahaan” yang menyebutkan bahwa:

“Tidak ada kurikulum yang baku yang disediakan oleh dunia usaha. Padahal sinkronisasi kurikulum ini sangat diperlukan”

(<https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/83939803/rumah-vokasi-gresik-sinergikan-industri-dan-lembaga-pendidikan>, diakses pada 20 November 2024)

Perlunya pemantauan dari program ini melalui kolaborasi yang solid antara *stakeholder* yang terkait agar program ini dapat mencapai efektivitas dari tujuan yang telah ditetapkan dan dapat menciptakan ketenagakerjaan yang lebih baik. Hal tersebut sangat penting dikarenakan lowongan kerja yang tersedia seringkali mengharuskan pelamar yang mempunyai sertifikat keahlian. Adapun pemantauan yang dilakukan terhadap program pelatihan ini menunjukkan bahwa aspek pengembangan *soft skill* masih perlu ditekankan. Peningkatan keterampilan

tersebut diharapkan dapat membekali peserta pelatihan dengan kompetensi yang relevan agar lebih siap menghadapi dinamika yang terus berkembang. Hal itu pastinya bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing dinamika pasar tenaga kerja yang kompetitif, seperti yang termuat dari kabar berita jatim.times.co.id berikut.

“Peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga pembekalan terkait etika kerja dan perilaku profesional. Choirul Rizal menekankan pentingnya *soft skill* ini dalam membentuk tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja serta dengan kolaborasi yang solid antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pelatihan dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik”
(<https://jatim.times.co.id/news/berita/vwe66s1sA/Ratusan-Warga-Gresik-Ikuti-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi>, diakses pada 22 Desember 2024)

Apabila dilihat dari penjabaran diatas, beberapa permasalahan tersebut termasuk ke dalam enam fokus Pemerintah Kabupaten Gresik yakni penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah Gresik dan juga termasuk pada tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan dari program pelatihan berbasis kompetensi ini juga bergantung dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak agar dapat mengatasi angka pengangguran yang signifikan. Tidak hanya itu, penyiapan SDM yang kompeten menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah, salah satunya upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan Rumah Vokasi Gresik melalui pelatihan kerja. Apabila sinergi yang diberikan tersebut sudah cukup kuat, maka akan mewujudkan keberhasilan dari program tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait “Efektivitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Gresik”. Penelitian ini menerapkan teori Budiani (2007) dalam menilai efektivitas suatu program pelatihan yang ada di Kabupaten

Gresik. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada keterampilan individu peserta saja tetapi juga dampaknya terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik yang dikenal sebagai kota industri. Penilaian dari teori efektivitas ini mungkin akan berbeda dengan wilayah lain karena kondisi geografis dan sosial ekonomi yang berbeda pula. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah dijabarkan diatas terkait perlunya efektivitas pelatihan untuk mengembangkan SDM Gresik yang unggul dan meningkatkan mutu atau kualitas SDM yang kompeten guna mengurangi angka pengangguran di Gresik.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu dari penjelasan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yaitu; “Bagaimana Efektivitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Gresik?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan judul “Efektivitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Gresik”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dapat diartikan sebagai pemahaman mengenai studi tertentu melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manfaat teoretis yang diperoleh melalui penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang terkait efektivitas dari pelaksanaan pelatihan dari program pelatihan berbasis kompetensi dalam upaya mengurangi angka

pengangguran dapat dijadikan sebagai referensi atau strategi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program yang serupa di wilayah lain, serta digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi akademik yang ingin melakukan studi lanjutan dari topik yang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam memberikan solusi untuk memecahkan masalah dari suatu isu tertentu dan dapat menjadi acuan penelitian di masa mendatang.

a) Bagi Penulis

Dapat memperluas wawasan penulis terkait penelitian Efektivitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Gresik dan menjadi prasyarat dalam mencapai sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dapat dimanfaatkan sebagai tambahan literatur dan referensi pada perpustakaan untuk kajian penelitian-penelitian selanjutnya pada Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

c) Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik

Dapat dipergunakan sebagai bahan kontribusi dan evaluasi dalam melaksanakan program atau kebijakan yang ada efektivitas dari pelaksanaan

program pelatihan berbasis kompetensi dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Gresik.

d) Bagi Masyarakat Kabupaten Gresik

Manfaat yang didapatkan masyarakat melalui penulisan dan penelitian ini ialah dapat mendorong partisipasi aktif bagi masyarakat dalam pelaksanaan pelatihan program pelatihan berbasis kompetensi sehingga dapat menjadi salah satu tolak ukur dari efektivitas program tersebut.